

# KAJIAN ZONASI KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN DI KABUPATEN MAYBRAT, PAPUA BARAT

## STUDY OF AGRICULTURAL COMMODITY ZONATION IN MAYBRAT DISTRICT, PAPUA BARAT

Meky Sagrim<sup>1a</sup>, Deny A. Iyai<sup>1</sup>, Stepanus Pakage<sup>1</sup>, Herman Tumbur<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Pertanian, Universitas Papua, Jl. Gunung Salju, Amban. Kode Pos 98314. Manokwari-Papua Barat.

<sup>a</sup> Korespondensi: Meky Sagrim, E-mail: Meckysagrim@yahoo.com  
(Diterima: 04-04-2020; Ditelaah: 05-04-2020; Disetujui: 28-09-2020)

### ABSTRACT

Developing agricultural sector needs integrated plans based on quality land resources and environment, human resources, and marketable oriented for farmers prestige and nation welfare. A field research using observatory and interview (semi-structured) methods done. In one hand, focus group discussion and/or rapid rural appraisal employed in targeted villages where respondents met. The finding of this research was that there were six agricultural developing zones, i.e. Agrosilvopastoral, Agroecotourism, Non-farming industry, Midle and small Entrepreneur zone, Ecotourism, and food store. Deciding agricultural commodity for crops, horticultural, fisheries, livestock and forestry were determined based on landuse suitability of *in-citu* areas. Creating food store has been done in order to promote Maybrat regency as food stability and food independence, which is in line with national program of food national resistant.

Keywords: Agrosilvopastoral, Agroecotouris, Ecotourism, Food store, Maybrat, Non-Farm, Maybrat, Zones.

### ABSTRAK

Pembangunan sektor pertanian perlu didukung dengan perencanaan yang berbasis pada kualitas sumberdaya lahan dan lingkungan, sumberdaya manusia, serta berorientasi pasar guna meningkatkan kemandirian petani dan kesejahteraan bangsa. Penelitian lapangan telah dilaksanakan dengan metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara semi-struktural. Selain itu, Focus Group Discussion atau Rapid Rural Apraisal juga dilakukan pada kampung dimana responden telah diwawancarai. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Zonasi pengembangan kawasan pertanian kabupaten Maybrat terbagi menjadi enam zona yaitu Agrosilvopastoral, Agroekowisata, Pengembangan Industri *Non Farm*, Industrialisasi Perkampungan dan Pengembangan UMKM, Ekowisata dan Lumbung pangan. Pemilihan komoditi pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan peternakan serta kehutanan di tentukan berdasarkan kesesuaian lahan di daerah setempat. Penciptaan zona lumbung pangan ini dilakukan guna menciptakan Kabupaten Maybrat sebagai kabupaten memiliki ketahanan serta kedaulatan pangan yang bersinergi dengan program ketahanan pangan nasional Indonesia.

Kata kunci: Agrosilvopastoral, Agroecotouris, Ecotourism, Food store, Maybrat, Non-Farm, Maybrat, Zones.

## PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah dituntut untuk berpacu menggali dan meningkatkan potensi sumberdaya alamnya seoptimal mungkin termasuk pada sektor pertanian yang mencakup sub-sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan (Rivai, 2011; Supriadi, 2008). Peran sektor pertanian dalam meningkatkan pendapatan daerah masih cukup besar mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia (43,21%) menggantungkan matapencaharian utama pada sektor pertanian (BPS-Indonesia, 2000). Dengan demikian, keberhasilan pembangunan daerah antara lain ditentukan oleh sektor pertanian, baik pada skala kecil maupun skala besar (Adimihardja, 2006).

Pembangunan sektor pertanian perlu didukung dengan perencanaan yang berbasis pada kualitas sumberdaya lahan dan lingkungan, sumberdaya manusia, serta berorientasi pasar guna meningkatkan kemandirian petani dan kesejahteraan bangsa (Adimihardja, 2006; Djaenuddin et al., 2002; Kodoati et al., 2014; Supriadi, 2008). Salah satu strategi percepatan pembangunan kawasan pertanian adalah dengan menentukan zonasi kawasan pertanian di suatu daerah kabupaten/kota atau provinsi. Dalam kaitannya dengan penentuan kawasan komoditas unggulan pertanian, perencanaan haruslah memperhatikan beberapa aspek antara lain: 1) aspek daya dukung lahan (Rivai, 2011), 2) agroklimat (Djaenuddin et al., 2002), dan 3) aspek sosial kemasyarakatan (Suradi, 2013). Hal ini perlu dilakukan guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan pertanian menuju peningkatan kualitas dan kuantitas produksi komoditas pertanian yang berkelanjutan (Supriadi 2008; Kemristekdikti, 2017; Rivai, 2011; Sagrim et al., 2017).

Secara fisiografis bahwa dalam perencanaan pembangunan pertanian hendaknya dilakukan dengan kajian yang baik untuk menetapkan pola pengembangan komoditas yang berbasis kawasan. Misalnya, dipikirkan untuk mengimplementasikan konsep utama Kementerian Pertanian, seperti Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU) (Supriadi 2008), Kawasan Agribisnis Hortikultura, Kawasan Industri Peternakan (KINAK), Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK), Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Kawasan Industri Masyarakat Perkebun (KIMBUN), Agropolitan, dan PRIMA TANI.

Berdasarkan berbagai pola pengembangan komoditas di atas, Kabupaten Maybrat diharapkan dapat memiliki zonasi pembangunan di bidang Pertanian yang terarah dalam mendukung program pembangunan di Maybrat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi zonasi pengembangan kawasan pertanian Kabupaten Maybrat yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, perumusan program, dan kegiatan pembangunan berdasarkan kawasan pertanian di kabupaten Maybrat.

## MATERIAND METODE

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan September sampai dengan bulan Nopember. Penentuan lokasi dilakukan secara sensus terhadap 24 distrik di wilayah Pemerintahan Kabupaten Maybrat yang dijadikan sebagai sasaran penelitian. Subyek penelitian ini ditentukan secara *stratified* berdasarkan struktur pemilikan dan akses masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pertanian menurut masing-masing kampung kajian—sesuai zona kawasan berdasarkan zona agroklimat yang ada. Obyek penelitian ini terdiri atas berbagai aspek yang berhubungan dengan tanah, air, dan aktifitas eksisting pertanian masyarakat petani dan atau peternak setempat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik survey (Moleong 1991). Survei tentunya berbeda-beda sesuai dengan jenis data, obyek, dan subyek penelitian. Selanjutnya, diambil sampel-sampel tanah sesuai lokasi-lokasi penelitian untuk dianalisis di Laboratorium Tanah UNIPA di Manokwari. Data mengenai luas tanah, struktur pemilikan (batas-batas) wilayah pemilikan tanah menurut kelompok keret, penyebaran jenis-jenis tanah, dan pola-pola peruntukan sumberdaya tanah-hutan dikaji dengan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang ditunjang dengan kegiatan survei dan pengamatan. Analisis kegiatan usahatani dilakukan dengan mengkaji jenis cabang usahatani yang dikembangkan, pola usahatani, bentuk usahatani, tipe usahatani, dan corak usahatani, serta penerapan teknologi produksi usahatani oleh petani (Suratiah, 2008). Data sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan pertanian dalam arti luas yang bersumber dari manusia maupun pengamatan langsung di lapangan dilakukan dengan pendekatan survei. Guna melengkapi informasi data sosial, budaya, dan ekonomi di atas,

dilakukan dengan pendekatan wawancara struktural, semi-struktural, ditambah dengan *Focus Group Discussion (FGD)* ataupun *Rapid Rural Appraisal (RRA)* dan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* (Priyono and Priyanti, 2018).

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa seluruh distrik di wilayah kabupaten Maybrat disensus, maka kampung-kampung per distrik dilakukan dengan cara purposive, dengan memperhatikan berbagai aspek seperti potensi pengembangan pertanian, kawasan-kawasan sentra produksi pertanian, serta kemungkinan penetapan zona pengembangan pertanian. Sampel kampung sebagaimana disebutkan di atas, dijadikan sebagai sasaran penelitian lapangan guna menyusun base line data sebagai dasar penetapan zona pengembangan pertanian. Data-data yang diperlukan pada tingkat kampung mencakup data tanah, situasi fisiografi dan geomorfologi, data kegiatan usatani, serta data sosial ekonomi dan budaya.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan pengamatan langsung terhadap subyek dan obyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengisi data/informasi ke dalam daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Demikian pula dilakukan pengamatan terhadap obyek dan subyek penelitian untuk meyakinkan dan/atau menyesuaikan antara data/informasi dengan kenyataan yang sebenarnya. Secara teknis, tim peneliti bersama petani mengunjungi lahan usahatani yang sedang dikelola, maupun lahan-lahan yang telah dan akan dikelola. Dalam kunjungan ke lahan yang sedang dikelola, dilakukan analisis usahatani mengenai luas lahan usahatani, jenis-jenis cabang usahatani yang dikembangkan, pengaturan jarak tanam, pengolahan tanah, dan teknologi budidaya, serta lahan-lahan yang merupakan bekas maupun calon pengembangan usahatani berikutnya. Setelah data terkumpul, dilanjutkan dengan tahapan pengolahan dan analisa data. Data/informasi dianalisa dan diinterpretasi dengan secara deskriptif, tabulasi, dan statistik (Ott and Longnecker, 2001; Field et al., 2012).

Secara umum variabel dan data pengamatan dalam rangka penyusunan zonasi pengembangan kawasan pertanian Kabupaten Maybrat, terdiri atas : (a) variabel dan data kependudukan, (b) fisiografi dan geomorfologi serta hidrologi, (c) sebaran luas lahan menurut fungsinya, (e) tanah, (f) pertanian dan perkebunan. Variabel dan data pengamatan meliputi Tanah terdiri dari jenis tanah didasarkan pada sistem taksonomi tanah USDA (Natural Resources Conservation Service,

1999), Kesesuaian lahan untuk menilai potensi sumberdaya lahan/tingkat kecocokan lahan untuk penggunaan tertentu mengacu pada Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian oleh Balai Penelitian Tanah – Puslibang Tanah Bogor (Balitbang-Tanah, 2003). Metode ini merupakan modifikasi dari kriteria Kesesuaian Lahan untuk komoditas pertanian versi 3.0 (Djaenuddin et al., 2000) serta Kerangka Evaluasi Lahan (FAO, 1976). Lahan-lahan yang dievaluasi dalam penelitian ini adalah lahan yang secara topografis atau kemiringan lereng masih dimungkinkan untuk pengembangan pertanian (kemiringan lerengnya kurang dari 25 %). Sebaliknya, lahan-lahan yang kemiringan lerengnya > 25% tidak dievaluasi untuk pengembangan pertanian dan lahan-lahan tersebut harus dihindarkan. Sosial ekonomi pertanian meliputi jenis-jenis tanaman bidang pertanian di sini kategorikan menjadi padi dan palawija, ubi-ubian, sayuran, kacang-kacangan, dan karbohidrat non ubi-ubian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat enam (VI) zonasi kawasan pengembangan pertanian di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. Enam zona ini dapat digunakan secara komprehensif didalam arahan penggunaan lahan untuk menata pembangunan sistem pertanian dengan baik.

### Zona I : Agrosilvopastoral

Pola pengembangan kawasan pertanian di zona I dipusatkan pada pengembangan *agroforestry* yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan (*agrosilvopastoral*). Potensi terbesar dari pengembangan tanaman pangan di wilayah zona ini terutama untuk mendukung produksi tanaman padi gogo dan kedelai. Pengembangan pertanian dengan padi sebagai komoditi diperlukan sebagai komoditi strategis guna mendukung kepentingan ketahanan pangan baik di tingkat kabupaten Maybrat maupun tingkat provinsi Papua Barat (Villano et al., 2019; Adimihardja, 2006; Pattinama, 2009). Selain itu, kondisi geografis wilayah ini yang tidak efektif untuk dilakukan budidaya tanaman pertanian secara intensif dititikberatkan untuk pengembangan hutan rakyat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

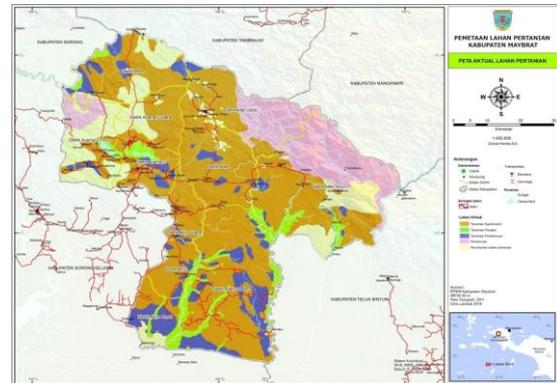
Program-program yang dirancang pada zona ini difokuskan untuk mendukung pembentukan kawasan *agrosilvopastoral* (Kartikasari et al., 2012) dan memberi tempat pada pertanian tanaman pangan sebagai program strategis. Selain tanaman pangan, komoditas unggulan terpilih peternakan, perikanan, hortikultura dan komoditas unggulan pengembangan hutan rakyat dirancang untuk dikembangkan guna meningkatkan ekonomi rakyat di wilayah tersebut.

Kegiatan agroindustri yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat di wilayah zona ini. Penyiapan pendirian pabrik pakan ternak skala mikro, pembibitan ternak, dan unit usaha pengolahan daging ternak menjadi kegiatan penting di wilayah ini. Program-program tersebut menjadi tanggung jawab beberapa sektor pemerintah untuk fokus berkegiatan di zona ini. Beberapa SKPD yang dirancang untuk bekerja di zona ini antara lain : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Koperasi UMKM.

Hal yang penting di dalam pola pengembangan pada zona ini adalah kerjasama saling sinergi antar SKPD, dan juga memberi tempat kepada lembaga-lembaga lain yang selama ini telah terbukti berhasil melakukan kegiatan pendampingan masyarakat guna lebih mengefektifkan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Selain itu, kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan mikro, pemanfaatan dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR), dari perusahaan-perusahaan yang berada di zona ini perlu menjadi perhatian. Dengan demikian, pengembangan jejaring kerjasama agribisnis, dan penyuluhan atau pendampingan (Komunitas-Pemerintah-Swasta) akan menjadi pokok perhatian.

Selain kerjasama dengan pihak lain, langkah terpenting untuk meningkatkan sektor pertanian pada zona ini adalah dengan meningkatkan sarana prasarana pertanian. Hal ini dilakukan guna menumbuhkembangkan minat pemuda dalam mengembangkan pertanian serta menjadikan mereka wirausahawan-wirausahawan muda pertanian di perkampungan/pedesaan. Sarana prasarana pendukung lain yang penting untuk ditingkatkan adalah prasarana permukiman perkampungan seperti MCK, air bersih, bantuan rumah sehat dan murah, serta pengembangan sistem energi murah dengan memanfaatkan sumberdaya energi.

Gambar 1. Pemetaan Lahan Pertanian Kabupaten Maybrat.



### Zona II : Agroekowisata

Zona ini merupakan zona dengan pola pengembangan kawasan pertanian yang dapat dipusatkan pada pengembangan *agroekowisata* yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan. Adapun pola pengembangan kawasan untuk pertanian berupa agropolitan dan perikanan berupa minapolitan sebagai program pengembangan komoditas strategi. Selanjutnya, potensi terbesar dari pengembangan pertanian di zona ini terutama untuk tanaman kehutanan, perkebunan, dan hortikultura. Pengembangan pertanian dengan kacang tanah dan jagung diperlukan sebagai komoditi strategis. Bahkan, untuk kepentingan ketahanan pangan di Kabupaten Maybrat, produktivitas tanaman pangan di zona ini perlu ditingkatkan, sehingga dalam pola pengembangan kawasan diharapkan tidak merubah peruntukan lahan pertanian pangan.

Di sisi lain, berbeda dengan zona I, pada zona II ini pengusaha pertanian tanaman pangan relatif lebih sedikit dan berorientasi hanya untuk dikonsumsi sendiri. Sumber penghasilan terbesar masyarakat adalah berasal dari usaha galian C (batu kapur dan pasir). Hal ini disebabkan sumberdaya alam dari bahan galian tersebut cukup tersedia dalam jumlah yang tinggi, sehingga untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maybrat, sumber utama pasir dan batu adalah bersumber dari daerah pada zona ini. Hal ini jika dibiarkan terus tanpa ada kontrol dan rehabilitasi lahan yang lebih baik, maka akan dipastikan beberapa tahun ke depan dapat terjadi penurunan kualitas lingkungan antara lain menurunnya debit air serta penyempitan luas areal hutan terutama di sekitar wilayah Danau Ayamaru.

Potensi alam yang mendukung di zona ini adalah keberadaan Danau Ayamaru sebagai *point of interest* pengembangan kawasan agroekowisata. Keberadaan danau ini menjadikan semua aktifitas kegiatan pertanian sebaiknya menitikberatkan pada konservasi area serta keberlanjutan Danau Ayamaru. Saat ini debit air yang berada di Danau ini semakin menurun, yang diduga diakibatkan oleh menurunnya debit air pada sungai-sungai pendukung. Deforestasi hutan serta kegiatan penambangan Galian C yang dilakukan di sekitar bantaran sungai diduga merupakan salah satu faktor pemicunya. Sedimentasi tinggi akibat penambangan menyebabkan debit air yang mengarah ke Danau Ayamaru menjadi berkurang.

Permasalahan lainnya yang terdapat di kawasan ini adalah keterbatasan lapangan kerja yang dicirikan oleh keterbatasan investasi yang menciptakan lapangan kerja karena keterbatasan sarana-prasarana pertanian. Dengan demikian, arah pengembangan kawasan pada zona ini harus ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan menekankan pada sektor jasa, dengan syarat tidak mengurangi peruntukan lahan untuk tanaman pangan dan hortikultura. Oleh sebab itu, perencanaan dan program pengembangan kawasan di zona ini diutamakan pada penciptaan lapangan kerja yang terfokus pada pengelolaan jasa lingkungan dengan mengembangkan sektor perkebunan wisata dan kondisi alam guna membuka peluang usaha dan kerja yang strategis.

Tabel 1. Jenis Komoditi berdasarkan Zonasi di Kabupaten Maybrat Papua Barat.

Program	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5	ZONA 6	Jumlah
Pengembangan Budidaya dan Peningkatan Produksi Pertanian							
<i>Tanaman Pangan</i>	V	V	V	V	V	V	6
<i>Tanaman Hortikultura</i>	V	V	V	V	V	V	6
<i>Tanaman Perkebunan</i>	V	V	V		V		4
<i>Kehutanan</i>	V	V	V	V		V	5
<i>Perikanan</i>	V	V	V		V		4
<i>Peternakan</i>			V	V		V	3
Pengembangan Agroindustri	V	V	V				3
<i>Kompos</i>				V			1
<i>Pupuk Krandalit</i>				V			1
<i>Keripik keladi</i>				V	V	V	3
<i>Nursery Tanaman Hias</i>				V			1
<i>Pembibitan Ikan</i>					V		1
<i>RPH</i>						V	1
<i>Pengolahan daging sapi</i>						V	1
<i>Pabrik Pakan</i>						V	1
Pengembangan Kelembagaan Pertanian Perkampungan							
<i>Lembaga keuangan</i>		V	V	V	V	V	5
<i>Jaringan Agribisnis</i>		V	V	V	V	V	5
<i>Jaringan Penyuluhan</i>		V	V	V	V	V	5
<i>Jaringan Pemasaran</i>		V	V	V	V	V	5
<i>Pasar Tani</i>		V	V	V	V	V	5
Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pertanian	V		V				2
<i>Kelompok tani</i>			V	V		V	3
<i>Koperasi tani</i>			V	V		V	3
<i>Badan Usaha Milik Daerah</i>			V		V	V	3
<i>Teaching Farm</i>			V	V		V	3
Pengembangan Industrialisasi Perkampungan dan Usaha Non Pertanian	V						1
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	

Untuk mendukung pengembangan agrowisata di kawasan ini, maka diperlukan berbagai program yang harus disinergikan untuk menjadi pengungkit perkembangan ekonomi kampung di zona ini.

Tercatat ada 12 program dalam tiga kategori langkah pengembangan untuk merevitalisasi pertanian dan membangun perkampungan di

zona ini. Program yang dirancang di zona ini, difokuskan untuk mendukung pengembangan kawasan agrowisata, dan memberi ruang terhadap pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan serta perikanan sebagai program strategis. Pengembangan minapolitan dan agropolitan (Abdullah et al., 2019) perlu dikembangkan

dalam kerangka mengangkat ekonomi masyarakat di wilayah ini. Guna keperluan produksi benih ikan, perlu dibangun pusat pengembangan benih dan produksi komoditi ikan mujair, gurame, ikan mas, nila, dan lele.

Program-program yang telah disampaikan di atas membutuhkan keterlibatan berbagai sektor pemerintah untuk fokus berkegiatan di zona ini. SKPD yang dirancang untuk mendukung pengembangan agropolitan dan minapolitan serta potensi jasa lingkungan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perikanan Darat, Dinas Perindustrian dan Koperasi, serta Dinas Pariwisata, dan Badan Lingkungan Hidup.

Hal terpenting di dalam pengembangan zona ini adalah saling bersinerginya SKPD yang terlibat. Selain itu, perlu dibuka kesempatan untuk saling bekerja sama antar lembaga yang dapat mendukung seperti lembaga keuangan, dan lembaga pendampingan masyarakat, serta pemanfaatan CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di zona ini. Oleh karena itu, penguatan jejaring kerjasama agribisnis dan penyuluhan atau pendampingan akan menjadi pokok perhatian.

Peningkatan sarana-prasarana pertanian pun perlu di dorong pada zona ini. Hal ini ditujukan agar dapat tercipta iklim usaha pertanian yang kondusif dan mudah di akses oleh para petani sehingga dapat memunculkan petani serta wirausahawan muda bidang pertanian di daerah ini. Peningkatan sarana prasarana permukiman penduduk pun perlu ditingkatkan seperti pengadaan sarana air bersih, MCK umum, bantuan rumah sehat dan rumah murah, serta pengembangan energi murah dan ramah lingkungan.

### **Zona III : Pengembangan Industri Non-Farm**

Zona ini merupakan zona yang pola pengembangannya berupa pengembangan industri *non-farm*. Meski demikian, pola pengembangan industri ini perlu di dukung dengan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Zona ini dititikberatkan pada pengembangannya karena pengusaha sebagian besar masyarakat di zona ini memiliki keterbatasan luas lahan (luas lahan yang sempit). Selain itu, kepadatan penduduk di zona ini pun relatif tergolong cukup tinggi.

Daerah ini memiliki potensi pengembangan industri non farm berbasis rumah tangga. Dengan

demikian, potensi ini didorong untuk meningkatkan ekonomi kampung sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan. Salah satu faktor yang mendorong tingginya angka kemiskinan di daerah ini adalah karena penguasaan lahan yang terbatas, dimana para petani rata-rata memiliki luasan lahan yang diusahakan relatif kecil. Hal ini juga disebabkan areal lahan yang dapat diusahakan untuk pertanian hanya berada pada spot-spot (cekungan) tertentu yang berada antara bukit-bukit. Topografi di daerah ini didominasi bukit dan gunung dengan struktur tanah berkapur sehingga banyak lahan yang tidak produktif untuk diusahakan sebagai lahan pertanian. Hal ini juga menjadi penyebab banyaknya masyarakat dari daerah ini melakukan urbanisasi ke kota terdekat seperti Sorong dan Manokwari.

Terkait keterbatasan pengembangan lapangan kerja di zona ini, dicirikan dengan keterbatasan investasi yang menciptakan lapangan kerja karena keterbatasan sarana prasarana pertanian dan perkampungan. Dengan demikian, arah pengembangan kawasan di zona ini ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan menekankan pada pengembangan industri non farm berbasis rumah tangga. Semua itu dilakukan untuk mengurangi urbanisasi masyarakat ke perkotaan. Oleh karena itu, arahan program dalam pengembangan industri *non-farm* menekankan pada keterlibatan rumah tangga-rumah tangga untuk pengelolaan pasca panen dalam rangka membuka peluang usaha dan kerja yang strategis di zona III ini.

Untuk mendukung pengembangan industri *non-farm* tersebut, maka diperlukan berbagai program yang harus disinergikan untuk menjadi pengungkit perkembangan ekonomi kampung di zona ini.

### **Zona IV : Industrialisasi Perdesaan dan Pengembangan UMKM**

Zona ini merupakan zona yang pola pengembangannya berupa pengembangan industri *non farm*. Meski demikian, pola pengembangan industri non farm ini perlu di dukung dengan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Zona ini dititikbertkan pada pengembangan industri non farm karena pengusaha sebagian besar masyarakat di zona ini memiliki keterbatasan luas lahan (luas lahan yang sempit). Selain itu, kepadatan penduduk di zona ini pun relatif tergolong cukup tinggi.

Daerah ini memiliki potensi pengembangan industri non farm berbasis rumah tangga (UMKM). Dengan demikian, potensi ini didorong untuk meningkatkan ekonomi kampung sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan. Salah satu faktor yang mendorong tingginya angka kemiskinan di daerah ini adalah karena penguasaan lahan yang terbatas, dimana para petani rata-rata memiliki luasan lahan yang diusahakan relatif kecil. Hal ini juga disebabkan areal lahan yang dapat diusahakan untuk pertanian hanya berada pada spot-spot (cekungan) tertentu yang berada antara bukit-bukit. Topografi di daerah ini didominasi bukit dan gunung dengan struktur tanah berkapur sehingga banyak lahan yang tidak produktif untuk diusahakan sebagai lahan pertanian. Hal ini juga menjadi penyebab banyaknya masyarakat dari daerah ini melakukan urbanisasi ke kota terdekat seperti Sorong dan Manokwari.

Terkait keterbatasan pengembangan lapangan kerja di zona ini, dicirikan dengan keterbatasan investasi yang menciptakan lapangan kerja karena keterbatasan sarana prasarana pertanian dan perkampungan. Dengan demikian, arah pengembangan kawasan di zona ini ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan menekankan pada pengembangan industri *non-farm* berbasis rumah tangga. Semua itu dilakukan untuk mengurangi urbanisasi masyarakat ke perkotaan. Oleh karena itu, arahan program dalam pengembangan industri non farm menekankan pada keterlibatan rumah tangga-rumah tangga untuk pengelolaan pasca panen dalam rangka membuka peluang usaha dan kerja yang strategis di zona III ini.

Untuk mendukung pengembangan industri non farm tersebut, maka diperlukan berbagai program yang harus disinergikan untuk menjadi pengungkit perkembangan ekonomi kampung di zona ini.

### **Zona V : Ekowisata**

Zona ini adalah zona yang pola pengembangan kawasan pertaniannya dapat dipusatkan pada pengembangan *ekowisata* yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan. Adapun pola pengembangan kawasan untuk pertanian berupa agropolitan dan perikanan berupa minapolitan sebagai program pengembangan komoditas strategi. Selanjutnya potensi terbesar dari pengembangan pertanian di zona ini terutama untuk tanaman kehutanan, perkebunan, dan hortikultura. Pengembangan pertanian dengan kacang tanah dan jagung diperlukan sebagai komoditi strategis. Bahkan,

untuk kepentingan ketahanan pangan di Kabupaten Maybrat, produktivitas tanaman pangan di zona ini perlu ditingkatkan, sehingga dalam pola pengembangan kawasan diharapkan tidak merubah peruntukan lahan pertanian pangan ini.

Pada zona ini perusahaan pertanian tanaman pangan relatif lebih sedikit dan berorientasi hanya untuk dikonsumsi sendiri. Sumber penghasilan terbesar masyarakat adalah berasal dari usaha galian C (batu kapur dan pasir). Hal ini disebabkan sumberdaya alam dari bahan galian tersebut cukup tersedia dalam jumlah yang tinggi sehingga untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maybrat, sumber utama pasir dan batu adalah bersumber dari daerah pada zona ini. Hal ini jika dibiarkan terus tanpa ada kontrol dan rehabilitasi lahan yang lebih baik, maka akan dipastikan beberapa tahun kedepan dapat terjadi penurunan kualitas lingkungan antara lain menurunnya debit air serta penyempitan luas areal hutan terutama disekitar wilayah Danau Ayamaru.

Potensi alam yang mendukung di zona ini adalah keberadaan Danau Ayamaru sebagai *point of interest* pengembangan kawasan agroekowisata. Keberadaan danau ini menjadikan semua aktifitas kegiatan pertanian sebaiknya menitikberatkan pada konservasi area serta keberlanjutan Danau Ayamaru. Saat ini debit air yang berada di Danau ini semakin menurun, yang diduga diakibatkan oleh menurunnya debit air pada sungai-sungai pendukung. Deforestasi hutan serta kegiatan penambangan Galian C yang dilakukan di sekitar bantaran sungai diduga merupakan salah satu faktor pemicunya. Sedimentasi tinggi akibat penambangan menyebabkan debit air yang mengalir ke danau ayamaru menjadi berkurang.

Permasalahan lainnya yang terdapat di kawasan ini adalah keterbatasan lapangan kerja yang dicirikan oleh keterbatasan investasi yang menciptakan lapangan kerja karena keterbatasan sarana-prasarana pertanian. Dengan demikian, arah pengembangan kawasan pada zona ini harus ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan menekankan pada sektor jasa, dengan syarat tidak mengurangi peruntukan lahan untuk tanaman pangan dan hortikultura. Oleh sebab itu, perencanaan dan program pengembangan kawasan di zona ini diutamakan pada penciptaan lapangan kerja yang terfokus pada pengelolaan jasa lingkungan dengan mengembangkan sektor perkebunan wisata dan kondisi alam guna membuka peluang usaha dan kerja yang strategis.

Tercatat ada 38 program dalam lima kategori langkah pengembangan untuk merevitalisasi pertanian dan membangun perkampungan di zona ini. Program yang dirancang di zona ini, difokuskan untuk mendukung pengembangan kawasan agrowisata, dan memberi ruang terhadap pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan serta perikanan sebagai program strategis. Pengembangan minapolitan dan agropolitan perlu dikembangkan dalam kerangka mengangkat ekonomi masyarakat di wilayah ini. Guna keperluan produksi benih ikan, perlu dibangun pusat pengembangan benih dan produksi komoditi Ikan mujaer, gurame, ikan mas, nila, dan lele.

Program-program yang telah disampaikan di atas membutuhkan keterlibatan berbagai sektor pemerintah untuk fokus berkegiatan di zona ini. SKPD yang dirancang untuk mendukung pengembangan agropolitan dan minapolitan serta potensi jasa lingkungan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perikanan Darat, Dinas Perindustrian dan Koperasi, Serta Dinas Pariwisata dan Badan Lingkungan Hidup.

Hal terpenting di dalam pengembangan zona ini adalah saling bersinerginya SKPD yang terlibat. Selain itu perlu dibuka kesempatan untuk saling bekerja sama antar lembaga-lembaga lain yang dapat mendukung seperti lembaga keuangan, dan lembaga pendampingan masyarakat, serta pemanfaatan CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di zona ini. Oleh karena itu, penguatan jejaring kerjasama agribisnis dan penyuluhan atau pendampingan akan menjadi pokok perhatian.

Peningkatan sarana-prasara pertanian pun perlu di dorong pada zona ini. Hal ini ditujukan agar dapat tercipta iklim usaha pertanian yang kondusif dan mudah di akses oleh para petani sehingga dapat memunculkan petani serta wirausahawan muda bidang pertanian di daerah ini. Peningkatan sarana prasarana permukiman penduduk pun perlu ditingkatkan seperti pengadaan sarana air bersih, MCK umum, bantuan rumah sehat dan rumah murah, serta pengembangan energi murah dan ramah lingkungan.

### **Zona VI : Lumbung Pangan**

Zona VI adalah zona yang pola pengembangan kawasan pertanian dan perkampungan-nya diorientasikan bagi lumbung pangan. Hal ini dilatarbelakangi dari eksisting kondisi zona ini

yang tindak budidaya pertanian para petaninya cukup tinggi dan intensif serta ketersediaan lahan pertanian yang cukup tersedia. Kepemilikan lahan untuk kegiatan budidaya pertanian rata-rata dimiliki oleh setiap orang secara pribadi, atau lahan milik keluarga adat yang kemudian diusahakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta untuk tujuan komersil. Selain itu, potensi hutan rakyat yang cukup tinggi di kawasan ini dapat di dorong untuk peningkatan perekonomian perkampungan (Sagrim et al., 2017). Potensi terbesar yang dapat dikembangkan di zona ini adalah terutama untuk tanaman pangan (padi gogo, kacang tanah, talas, ubi jalar, jagung), kehutanan (jati, jamur tiram, lebah madu, jabon dan bambu), peternakan (sapi, kambing, ayam, babi). Pengembangan pertanian dengan padi gogo, talas dan kacang tanah sebagai komoditi pertanian dijadikan komoditi strategis. Sebagai komoditi strategis, program-program pengembangan komoditi-komoditi tersebut didorong untuk kepentingan ketahanan pangan di Kabupaten Maybrat. Dengan demikian pengembangan kawasan ini diharapkan tidak mengubah peruntukan lahan pertanian pangan tersebut.

Selain itu, karena zona VI merupakan zona yang warganya sebagian besar sebagai petani pemilik lahan sehingga sangat memungkinkan untuk menjadikan zona ini sebagai lumbung pangan Kabupaten Maybrat, bahkan untuk Provinsi Papua Barat. Hal ini dilakukan agar mencegah dampak krisis pangan (Rivai, 2011) di Kabupaten Maybrat dan daerah-daerah disekitarnya.

Meskipun demikian, sangat disadari bahwa zona ini memiliki keterbatasan pengembangan lapangan kerja. Hal ini dicirikan oleh keterbatasan investasi yang menciptakan lapangan kerja karena keterbatasan sarana prasarana pertanian perkampungan. Sehingga arah pola pengembangan kawasan di zona ini ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja dengan penekanan pada penciptaan lumbung pangan. Tujuan dari semua ini adalah juga untuk mengurangi arus urbanisasi masyarakat dari kawasan ini ke daerah perkotaan disekitar kabupaten Maybrat seperti kota Sorong dan Manokwari. Oleh karena itu, arahan program dalam pengembangan lumbung pangan melalui peningkatan dan rehabilitasi sarana-prasaran pertanian menjadi pilihan yang strategis.

Tercatat 36 program dari 5 kategori langkah pengembangan yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi pertanian di zona VI. Program-

program yang direncanakan, ditujukan untuk mendukung program pembentukan lumbung pangan dalam zona ini, serta memberi tempat untuk pengembangan peternakan, kehutanan dan industri *non farm* sebagai program strategis guna peningkatan ekonomi rakyat. Selain itu komoditas unggulan pengembangan hutan rakyat dirancang untuk dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi wilayah. Pendirian pusat lumbung pangan merupakan kegiatan penting untuk mendorong dan menciptakan kemandirian dan kedaulatan pangan di Kabupaten Maybrat. Komoditi lainnya yang diusahakan di zona ini didorong untuk meningkatkan ekonomi wilayah.

Keterlibatan berbagai sektor dalam melaksanakan berbagai program sangat menentukan berhasil tidaknya perencanaan pengembangan pertanian di zona ini. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dirancang untuk mendukung pengembangan lumbung pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informasi, serta lembaga-lembaga keuangan swasta dan LSM terkait. Hal paling penting adalah saling sinergi antara SKPD dan memberi ruang bagi lembaga-lembaga lain untuk dapat bekerja sama membangun zona ini.

### KESIMPULAN

Disimpulkan bahwa zonasi pengembangan kawasan pertanian kabupaten Maybrat dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) zona, yaitu zona agrosilvopastoral, zona agroekowisata, zona pengembangan industri Non Farm, zona industrialisasi perkampungan dan pengembangan UMKM), Zona ekowisata dan zona lumbung pangan. Pemilihan komoditi pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan peternakan serta kehutanan ditentukan berdasarkan kesesuaian lahan di daerah setempat. Penciptaan zona lumbung pangan ini dilakukan guna menciptakan Kabupaten Maybrat sebagai kabupaten yang memiliki ketahanan serta kedaulatan pangan yang bersinergi dengan program ketahanan pangan nasional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Agustina, Hikmah M Ali, and Jasmal A Syamsu. 2019. "Status Keberlanjutan Adopsi Teknologi Pengolahan Limbah Ternak Sebagai Pupuk Organik" 31 (1): 11-20.
- Adimihardja, Abdurachman. 2006. "Strategi Mempertahankan Multifungsi Pertanian Di Indonesia." *Jurnal Litbang Pertanian* 25 (98): 99-105.
- Balitbang-Tanah. 2003. *Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan Untuk Komoditas Pertanian*.
- BPS-Indonesia. 2000. *Statistik Indonesia Tahun 2000*.
- Djaenuddin, D, Y Sulaeman, and A Abdurahman. 2002. "Pendekatan Perwilayahan Komoditas Pertanian Menurut Pedo-Agroklimat Di Kawasan Timur Indonesia." *Jurnal Litbang Pertanian* 21 (1).
- Djaenuddin, DHM, H Subagyo, A Mulyani, and H Suharta. 2000. *Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Komoditas Pertanian*.
- FAO. 2000. "A Framework for Land Evaluation." *FAO Soils Bulletin*, 2000.
- Field, A, J Miles, and Field Zoe. 2012. *Discovering Statistics Using R*. 1st ed. London: Sage Publication Ltd.
- Kartikasari, S.N., A.J. Marshall, and B.M. Beehler. 2012. *Seri Ekologi Indonesia, Jilid VI: Ekologi Papua*.
- KEHATI. 2017. "Annual Report KEHATI 2017."
- Kemristekdikti-RI. 2017. "Laporan Tahunan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi 2017."
- Kodoati, G, P O V Waleleng, J Lainawa, and D R Mokoagouw. 2014. "Analisis Potensi Sumberdaya Alam, Tenaga Kerja, Pertanian Dan Perkebunan Terhadap Pengembangan Peternakan Sapi Potong Di Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa." *Jurnal Zootehnik* 34 (Mei): 15-26.
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. 3rd ed. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Natural Resources Conservation Service, USDA. 1999. *Soil Taxonomy A Basic System of Soil Classification for Making*

- and Interpreting Soil Surveys.* Washington DC, USA.
- Ott, R. Lyman, and Michael Longnecker. 2001. *An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis.* 5th ed. USA: Duxbury.
- Pattinama, M J. 2009. "Poverty Reduction through Local Wisdom." *Makara, Sosial Humaniora* 13 (1): 1–12.
- Priyono, and A Priyanti. 2018. "Perspektif Perkembangan Ketersediaan Produksi Sumber Protein Asal Ternak Di Indonesia ( Perspective on the Production Availability of Animal Protein Source from Livestock in Indonesia )." *Wartazoa* 28 (1): 23–32.
- Rivai, Rudy S. 2011. "BERKELANJUTAN DI INDONESIA Concept and Implementation of Sustainable Agricultural Development in Indonesia," 13–25.
- Sagrim, Meky, Agus Irianto Sumule, Deny Anjelus Iyai, and Michael Baransano. 2017. "Potensi Unggulan Komoditas Pertanian Pada Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Pegunungan Arfak , Papua Barat ( Prime Potency of Agriculture Commodities on Highland of Arfak Mountains Regency , Papua Barat )" 22 (3).  
<https://doi.org/10.18343/jipi.22.3.141>.
- Supriadi, Herman. 2008. *Instruksi Presiden Republik Indonesia ( INPRES ) Nomor 05 /2007.* Vol. 6.
- Suradi. 2013. "Kondisi, Potensi Dan Sumberdaya Suku Alune Di Seram Bagian Barat, Maluku." *Sosiokonsepsia* 18 (2): 205–24.
- Suratiah, K. 2008. *Ilmu Usahatani.* 2nd ed. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Villano, Renato, Bright Owusu, and Boris Bravo-ureta. 2019. "Land Use Policy Farming Systems and Productivity Gaps: Opportunities for Improving Smallholder Performance in the Forest-Savannah Transition Zone of Ghana." *Land Use Policy* 82 (December 2018): 220–27.  
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.12.010>.